PERTEMUAN 5 KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN

1. E-government

Pesatnya perkembangan teknologi internet sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat. Hadirnya teknologi internet semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai macam aktifitas.

Bidang pemerintahan dalam hal ini pemerintah sudah menggunakan teknologi untuk mempermudah masyarakat mengenal dan terutama pemanfaatan teknologi dibuat guna melayani masyarakat secara luas. Dengan menggunakan teknologi sebagai alat pengolahan data, pemerintah dapat mengolah data seperti data penduduk, kesehatan, tenaga kerja, dan sebagainya. Pemerintah menggunakan komputer untuk menangani masalah administrasi.

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan diberbagai sektor. Pemerintah tidak ingin ketinggalan untuk memanfaatkan perkembangan komputer cukup signifikan. Pemanfaatan media komputer pada pemerintahan sangatlah mempengaruhi kinerja dalam pengolahan data-data.

E-government merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah untuk melayani masyarakat secara online. Aplikasi ini memungkinkan pelayanan publik terjadi begitu intens karena bersifat online. Penyederhanaan birokrasi terjadi karena untuk menyampaikan ide, keluhan masyarakat tidak harus mengantri. Terjadinya komunikasi yang dilakukan pada warga dengan pemerintah ataupun sebaliknya, adanya peningkatan efisiensi pada suatu organisasi, tentunya dapat menghemat pembayaran pajak. Layanan public online merupakan salah satu hasil dari penerapan e-government. Masyarakat mudahnya melaporkan suatu keluhan ataupun keresahan yang terjadi pada lingkungan.

Sejak tahun 1995 e-government sudah mulai diterapkan contohnya Bina Graha Net yang berada di Istana Negara, lalu muncullah website instalasi kepemerintahan. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 adalah awal dari peningkatan perkembangan e-government. E-government meningkat secara signifikan tidak hanya pada pemerintahan pusat namun pemerintahan daerah saat ini sudah mulai menggunakannya.

A. Definisi E-government

E-government dapat didefinisikan sebagai pelayanan pemerintahan yang menggunaan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan.

B. Manfaat E-government

1) Memberikan kualitas dalam bentuk pelayan kepada masyarakat.

- 2) Sebagai sarana keterbukaan ditubuh pemerintah sehingga bisa dijadikan sebagai faktor pengontrol kinerja pemerintah dimana akhirnya pemerintah tersebut dapat bekerja tanpa penyelewengan penggunaan fungsinya.
- 3) Menghemat biaya administrasi.
- 4) Pemerintahan dapat menjawab serta mencari solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi.
- C. Maksud serta tujuan dari peningkatan E-government

Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas terkait proses administrasi Negara atau keperluan lain-lain. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut terdapat beberapa tujuan yang akan tercapai :

- 1) Kebutuhan masyarakat akan informasi terpenuhi karena adanya penjaringan informasi kepada layanan publik yang berkualitas.
- 2) Peningkatan perekonomian tentunya harus adanya hubungan interaktif kepada seluruh pedagang ataupun di dalam dunia bisnis.
- 3) Terdapat fasilitas yang mendukung untuk terjadinya dialog terbuka antara pemerintah dengan masyarakat.
- 4) Transaksi serta layanan antara lembaga pemerintahan yang transparansi.

2. Pemicu Utama E-government

Negara Indonesia terhitung terlambat dalam menerapkan dan mengembangkan bentuk pelayanan e-government ini dibandingkan dengan negara maju. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

- a. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan.
- b. Sistem administrasi sedang dalam proses pengembangan.

Perkembangan aplikasi di negara maju sangat cepat. Cepatnya perkembangan aplikasi komputer tersebut sudah mulai menimbulkan masalah untuk negara-negara tersebut sehingga hal tersebut merupaka hal serius sehingga diperlukan perhatian khusus untuk menangani hal tersebut. Berbeda dengan Indonesia yang perkembangannya cukup pelan dan belum menimbulkan masalah yang butuh penanganan khusus.

Pemicu utama perkembangan e-government menurut sejarahnya ada tiga konsep, yaitu : a. Era globalisasi yang berkembang dengan pesat banyaknya isu-isu yang muncul pada masyarakat diantaranya seperti perdagangan bebas bea cukai, hak asasi manusia, pasar terbuka dan masih banyak lagi lainnya dan itu merupakan hal yang harus sangat diperhatikan pemerintah pusat dimana pemerintah pusat harus benar-benar mengontrol

setiap isu yang ada. Pemerintah Tentunya harus mengambil reposisi dalam sebuah negara, dari mulai yang internal dikepemerintahan maupun pada masyarakat dimana pemerintah harus benar-benar memperhatikan semua aspek pada masyarakat.

- b. Akibat kemajuan pada teknologi tentunya sangat dengan mudah data dan informasi dapat diakses masyarakat di seluruh belahan dunia, hanya butuh beberapa detik untuk mengakses sebuat data atau informasi yang ada. Peranan pemerintah untuk mengatur bagaimana menyikapi dalam melayani masyarakat, dikarenakan secara tidak langsung masyarakat yang mengambil alih.
- c. Peningkatan pada kualiats pola pikir atau kegiatan masyarakat dimana dunia industri memerlukan tenaga yang lebih mengerti teknologi terbaru dari mesinnya. Pada kinerja di sektor swasta percepatan kemajuan terbilang lebih lambat, sehingga masyarakat tahu adanya sebuah ketidak sejajaran pada sistem palayanan. Secara tidak langsung masyarakat menghimbau kepada pemerintah bagaimana caranya agar dapat meningkatkan kinerjanya.

Ketiga aspek tersebut merupakan tekanan yang dilakukan oleh masyarakat pada pemerintah agar dapat memperbaiki kinerjanya yang lebih signifikan, dengan adanya teknologi.

3. Strategi Pengembangan E-government

Strategi pada e-government dikerjakan dalam 6 strategi, diantaranya :

- a. Sistem pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan dapat dipercaya.
- b. Pengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, harus mengikut sertakan dunia usaha.
- c. Sistem manajemen pada proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- d. Dalam pengembangan industri telekomunikasi dan informasi, dunia usaha harus memanfaatkan teknologi.
- e. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.
- f. Pengembangan kapasitas SDM ditubuh pemerintah pusat dan daerah yang disertai dengan meningkatnya e-literacy masyarakat.

Beberapa contoh aplikasi yang menunjang administrasi pemerintah dan sukses memberikan pelayanan maupun informasi yang berguna bagi masyarakat, antara lain :

a. mCity

Aplikasi mCity adalah sebuah aplikasi mengenai informasi suatu kota yang bisa diakses melalui *smartphone*. Wisatawan dapat mencari tahu tentang kota tujuan dengan bantuan aplikasi mCity. Singkatnya, aplikasi ini dapat diartikan sebagai penunjuk jalan serta pemberi informasi mengenai suatu kota. Informasi lengkap mengenai kota tersebut seperti info tentang kuliner, tempat wisata, hingga penginapan.



Gambar 5.1 Aplikasi mCity

b. Qlue

Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah di DKI Jakarta yang diluncurkan pada desember 2014. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk menginformasikan kerusakan fasilitas, keluhan dan sebagainya. Selain itu masyarakat dapat mengupload foto jika ada masalah yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat tersebut berada.



Gambar 5.2 Aplikasi Qlue

c. Lapor!

Aplikasi Lapor! merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi serta pengaduan dari masyarakat yang berbasis media sosial. Proses penanganan keluhan pada aplikasi ini dapat dipantau dan diawasi oleh publik. Selain untuk menyampaikan laporan, aplikasi ini juga terdapat fitur dialog virtual antara pemerintah dan masyarakat.



Gambar 5.3 Aplikasi Lapor!

d. Info BMKG

Aplikasi ini dibuat dan digunakan oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Pada aplikasi ini kita bisa melihat perkiraan cuaca, analisis iklim, dan informasi terjadinya gempa di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi jika gempa yang terjadi berpotensi tsunami. Aplikasi inipun memuat press release jika ada himbauan ataupun pernyataan resmi dari pihak BMKG.



Gambar 5.4 Aplikasi BMKG

e. BPOM Mobile

Aplikasi ini dibuat dan digunakan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dalam keterangannya di Playstore, pada aplikasi ini masyarakat bisa mengecek suatu produk menggunakan Kode QPR ataupun Kode Batang. Dalam aplikasi ini masyarakat bisa juga menyampaikan aduan terhadap suatu produk kepada BPOM.



Gambar 5.5 Aplikasi BPOM

4. Tugas Humas Pemerintah

Transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga. Transparansi dalam menjalankan fungsi sebuah lembaga serta transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sangat penting karena masyarakat berhak untuk mengetahui suatu kebenaran. Sebagai jembatan informasi antara suatu lembaga dengan masyarakat maupun antara lembaga, posisi humas suatu lebaga di pemerintahan sangatlah penting. Beberapa tugas penting humas suatu lembaga menurut yang dikutip oleh Amalia (2012):

- a. Menurut Ardianto, E. (2011:239) menjelaskan bahwa kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan kegiatan utama pemerintah. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pemerintah harus memiliki birokrasi yang sederhana.
- b. Menurut Cutlip.C dan Broom (2007:468) praktisi humas pemerintah memiliki tugas utama yakni memberikan informasi. Harus diingatkan juga bahwa dalam sistem politik harus mampu memberi jarak (membatasi) peran khusus.

Joice J Gordon mengartikan humas seharusnya berperan khusus yang berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Berikut tugas humas yang dijelaskan Gordon:

- a. Memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konstituen tentang agenda kepemerintahan.
- b. Memastikan bahwa adanya suatu kerjasama yang aktif di dalam sebuah program kepemerintahan dan adanya kewajiban untuk mematuhi kebijakan.
- c. Memajukan dan mendorong masyarakat agar dapat mendukung kebijakan serta program pemerintah.
- d. Dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

5. Isu sosial dan masalah

Berikut ini adalah beberapa isu sosial dan masalah yang muncul dari penerapan sistem eGovernment.

- a. Semakin bebasnya dalam hal akses situs pemerintah, dapat menimbulkan cyber crime sehingga dapat merusak sistem komputer pada e-government.
- b. Semakin berkurangnya komunikasi atau interaksi sosial antara admin pemerintah dengan masyarakat.
- c. Kurangnya pengetahuan atara masyarakat satu dengan yang lainnya dalam penggunaan egovernment, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas.
- d. Kurangnya pelayanan yang diberika, karena sistem manajemen atau proses kerja dalam hal kesiapan prosedur dan peraturan masih membatasi SDM.
- e. Belum kuatnya strategi mengenai anggaran yang digunakan untuk pengembangan situs egovernment.
- f. Sejumlah faktor seperti keamanan informasi, otentikasi, dan standarisasi antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.
- g. Kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet masih terdapat kesenjangan. Meskipun telah lama diatur dalam undang-undang untuk segera diterapkan di seluruh sendi pemerintahan, namun tidak semua daerah menerapkan sistem e-government.

C. SOAL LATIHAN/TUGAS

- 1. Jelaskan pengertian dari e-government!
- 2. Menurut anda apa peranan komputer di bidang permerintahan?
- 3. Bagaimana penerapan e-government yang benar?
- 4. Faktor-faktor apa saja yang akan mendorong e-government di dalam pemerintahan?
- 5. Sebutkan manfaat e-government bagi masyarakat!
- 6. Bagaimana perkembangan e-government di Indonesia?

JAWAB

- 1. E-government merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah untuk melayani masyarakat secara online. Aplikasi ini memungkinkan pelayanan publik terjadi begitu intens karena bersifat online.
- 2. Peranan Komputer dibidang pemerintahan?
 - Pengolahan Data: Komputer digunakan untuk pengolahan data yang melibatkan berbagai aspek pemerintahan, seperti pendataan populasi, statistik ekonomi, administrasi kepegawaian, dan keuangan negara. Dengan menggunakan komputer, data dapat diolah dengan lebih efisien dan akurat, memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti.
 - Sistem Informasi: Komputer digunakan untuk membangun dan mengelola sistem informasi pemerintahan, seperti basis data publik, sistem manajemen kepegawaian, sistem keuangan, dan sistem administrasi lainnya. Sistem informasi ini membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan akses data yang diperlukan untuk menjalankan fungsifungsi pemerintahan.
 - Komunikasi dan Jaringan: Komputer memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal di antara lembaga-lembaga pemerintah, serta antara pemerintah dan masyarakat. Email, surat elektronik, video konferensi, dan portal pemerintah adalah contoh penggunaan komputer dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi di antara entitas-entitas yang terlibat dalam proses pemerintahan.

- 3. Bagaimana penerapan e-government yang benar?
 - Strategi dan Perencanaan: Langkah awal dalam penerapan e-government adalah mengembangkan strategi dan rencana yang jelas. Hal ini melibatkan identifikasi tujuan yang ingin dicapai dengan adopsi e-government, analisis kebutuhan pengguna, identifikasi kendala yang mungkin terjadi, dan merencanakan langkah-langkah implementasi yang tepat.
 - Infrastruktur Teknologi: E-government memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung operasionalnya. Ini termasuk konektivitas internet yang cepat dan andal, perangkat keras yang memadai, sistem jaringan yang aman, dan pusat data yang handal. Pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya yang cukup untuk membangun dan memelihara infrastruktur ini.
 - Keamanan Informasi: Keamanan informasi adalah aspek penting dalam penerapan e-government. Data sensitif dan rahasia yang dikelola oleh pemerintah harus dilindungi dari ancaman keamanan dan penyalahgunaan. Penerapan protokol keamanan, enkripsi data, penggunaan sertifikat digital, dan mekanisme otentikasi yang kuat harus diperhatikan dengan serius.
 - Layanan Publik Online: Salah satu tujuan utama e-government adalah memberikan layanan publik yang mudah diakses secara online. Pemerintah harus mengembangkan platform online yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga warga negara dapat mengakses informasi, mengajukan permohonan, membayar pajak, dan melakukan transaksi administrasi lainnya dengan mudah dan efisien.
- 4. Faktor-faktor yang akan mendorong e-government di dalam pemerintahan
 - Perkembangan Teknologi: Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor utama dalam mendorong penerapan e-government. Perkembangan infrastruktur internet, perangkat lunak, dan perangkat keras yang lebih canggih memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan online yang lebih baik dan efisien.
 - Tuntutan Efisiensi dan Transparansi: Penerapan e-government dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan dan transparansi dalam pengelolaan publik. Dengan adopsi sistem otomatisasi dan pengolahan data elektronik, pemerintah dapat mengurangi birokrasi, menghindari kesalahan manusia, dan memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi publik.
 - Tuntutan Partisipasi Publik: Masyarakat modern cenderung lebih terlibat dan mengharapkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan pemerintah. E-government dapat

memberikan platform untuk partisipasi publik yang lebih besar melalui forum diskusi online, survei elektronik, dan mekanisme umpan balik.

- Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan: E-government memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik secara online yang dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini menghilangkan batasan geografis dan waktu, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi warga negara yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas.
- Penghematan Biaya: E-government dapat mengurangi biaya administrasi pemerintahan dengan menggantikan proses manual yang memakan waktu dan sumber daya dengan proses otomatisasi. Misalnya, pembayaran pajak online dapat mengurangi biaya cetak kertas dan penanganan manual.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan: Dengan e-government, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Layanan dapat disediakan dengan lebih cepat, responsif, dan akurat, serta memungkinkan warga negara untuk melacak status permohonan atau transaksi mereka secara online.

5. manfaat e-government bagi masyarakat!

- -Mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayan publik.
- -Membuat kegiatan pemerintahan menjadi transparan
- -Mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi.

6. Perkembangan E Goverment di indonesia

Perkembangan e-government di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah mendorong adopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa perkembangan e-government di Indonesia:

- Portal Nasional dan Aplikasi Pelayanan Publik: Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Portal Nasional dan berbagai aplikasi pelayanan publik seperti e-KTP, e-Pajak, e-BPJS, dan sebagainya. Portal ini menjadi pintu gerbang tunggal untuk mengakses berbagai layanan publik online, memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif dan transaksi dengan pemerintah.
- Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara (SIMKeu): SIMKeu adalah sistem yang digunakan untuk mengelola anggaran dan keuangan negara secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah mengelola dan melacak penggunaan anggaran secara efisien dan transparan, serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
- Penyediaan Layanan Publik Online: Pemerintah Indonesia terus meningkatkan penyediaan layanan publik online. Berbagai layanan seperti pembayaran pajak, pengajuan izin, pendaftaran perusahaan, pengaduan masyarakat, dan lain-lain dapat diakses secara

online. Ini memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administratif tanpa harus datang ke kantor pemerintah.

- Program Desa Digital: Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Desa Digital yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas internet dan pemberdayaan teknologi di tingkat desa. Program ini memberikan akses internet dan pelatihan teknologi kepada masyarakat desa, memungkinkan mereka untuk mengakses layanan publik online dan mengembangkan potensi ekonomi digital.
- Transparansi dan Open Data: Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses terbuka terhadap data publik. Berbagai portal data publik dan inisiatif open data telah diluncurkan untuk memastikan informasi publik dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan transparan.
- Partisipasi Publik: E-government di Indonesia juga berfokus pada partisipasi publik. Pemerintah mengadakan forum online, konsultasi publik, dan survei elektronik untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, menyampaikan aspirasi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan program pemerintah.